

**TESIS**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TIMOR LESTE TERHADAP HAK  
KEPEMILIKAN ATAS TANAH DALAM MEWUJUDKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM DAN TERCAPAINYA KeadILAN**



**HERMENEGILDO MAGNO GOMES**

No. Mhs: 105201521/PS/MIH

**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2012**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : Hermenegildo Magno Gomes  
Nomor Mahasiswa : 105201521/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Agraria  
Judul Tesis : KEBIJAKAN PEMERINTAH TIMOR LESTE TERHADAP HAK  
KEPEMILIKAN ATAS TANAH DALAM MEWUJUDKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM DAN TERCAPAINYA KEADILAN

**Nama Pembimbing**  
Dr. Ir. Tjahjo Arianto, SH., M. Hum.

**Tanggal**  
30/01/2012

**Tanda Tangan**

S.W. Endah Cahyowati, SH., MS.

30/01/2012



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : Hermenegildo Magno Gomes  
Nomor Mahasiswa : 105201521/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Agraria  
Judul Tesis : KEBIJAKAN PEMERINTAH TIMOR LESTE TERHADAP HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN TERCAPAINYA KEADILAN

**Nama Tim Penguji**  
(Ketua)  
**Dr. Ir. Tjahjo Arianto, SH., M. Hum.**  
(Anggota)

**Tanggal**  
30/3 2012

**Tanda Tangan**

**S.W. Endah Cahyowati, SH., MS.**  
(Anggota)

30/3 2012

**D. Krismantoro, SH., M. Hum.**

30/3 2012



**Ketua Programa Studi MIH**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**(B. Bambang Riyanto, SH., M. Hum.)**

## SURAT PERNYATAAN

Penulis menyatakan bahwa Tesis yang berjudul **“KEBIJAKAN PEMERINTAH TIMOR LESTE TERHADAP HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN TERCAPAINYA KEADILAN”** benar-benar hasil karya asli sendiri dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain yang sebelumnya sudah ada.

Seluruh kutipan yang berasal dari literatur, makalah, peraturan perundang-undangan telah dicantumkan sumbernya. Apabila terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Dengan demikian, surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya supaya dapat dipergunakan semestinya.

Yogyakarta, 28 Maret 2012

Penulis

  
( Hermenegildo Magno Gomes )

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan secara spesial untuk berbagai pihak yang mempunyai peranan penting dalam keberhasilan penulisan Tesis ini yakni kepada:

1. Almarhum Ayah penulis Bapak FERNANDO "LESUGATAL" GOMES yang tidak dapat menyaksikan keberhasilan Putra Bungsunya dalam menyelesaikan pendidikan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibunda penulis, yakni: PRISCA DA CONCEICAO karena berkat dukungan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studynya di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Saudara/i penulis, seperti: ADRIANO DA CUNHA GOMES, AGAPITO XAVIER GOMES, BENJAMIN DA CUNHA F. GOMES, NORBERTO DA CONCEICAO GOMES, FERNAO DE ARAUJO GOMES, SEBASTIAO DA CONCEICAO GOMES dan NOVENA FERNANDA GOMES beserta keluarga yakni: Istri dan anak-anaknya yang selama ini membantu penulis secara moril dan material untuk mengikuti study di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Keluarga besar LESUGATAL di Desa Cassa/Timor Leste khususnya dan umumnya di mana saja berada yang selama ini mensupport dan membantu penulis berupa material dan moril untuk mengikuti study di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa/i angkatan Januari 2011 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan juga teman-teman lain yang selama ini membantu penulis dalam proses mengikuti study dan proses penulisan Tesis ini.

Yogyakarta, 28 Maret 2012

Penulis

  
(Hermenegildo Magno Gomes)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan Judul Tesis adalah: **“KEBIJAKAN PEMERINTAH TIMOR LESTE TERHADAP HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN TERCAPAINYA KEADILAN”**, dengan baik dan lancar. Telah dipertahankan oleh penulis di depan Team Pengujih pada tanggal 28 Maret 2012 dan dinyatakan lulus dalam ujian Tesis.

Fokus penulisan pada Tesis ini adalah melihat permasalahan pertanahan dalam hal hak kepemilikan atas tanah yang terjadi pada masa Penjajahan Portugis dan pendudukan Indonesia di Timor Leste yang dimiliki oleh warga negaranya dengan terjadinya perubahan kemerdekaan Timor Leste sehingga kebijakan pemerintah Timor Leste terhadap hak kepemilikan atas tanah dalam mewujudkan perlindungan hukum dan tercapainya keadilan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah dan Parlemen Timor.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang tidak disengaja sehingga penulis sangat mengharapkan masukan-masukan dari para pembaca agar dapat melengkapi Tesis ini dan pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bapak Dr. R. Maryatmo, MA. dan seluruh Civitas Akademis Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M. Hum.
3. Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bapak B. Bambang Riyanto, S.H., M. Hum.
4. Dosen Pembimbing I dan juga sebagai Ketua Team Pengujih, Bapak Dr. Ir. Tjahjo Arianto, S.H., M.Hum. yang selama ini membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.

5. Dosen Pembimbing II dan juga sebagai Anggota Team Pengujih, Ibu S. W. Endah Cahyowati, S.H., MS. yang Selama ini membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.
6. Anggota Team Pengujih Tesis ini pada tanggal 28 Maret 2012, Bapak D. Krismantoro, SH., M. Hum. Yang memberikan masukan untuk penyempurnaan Tesis ini.
7. Bapak/Ibu Dosen, Staf Administrasi dan Perpustakaan pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Directur Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais-Timor Leste/DNTPSC, Bapak Jaime Xavier Lopes, M. Eng. yang telah bersedia untuk menjadi Narasumber dalam penulisan Tesis ini serta seluruh stafnya yang telah membantuh penulis untuk memperoleh data yang diperlukan.
9. Terakhir kepada seluruh kalangan dan berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam proses penulisan Tesis ini namun pada kesempatan ini penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu semoga amal baiknya dapat diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, akhir kata pengantar ini penulis mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 28 Maret 2012

Penulis

  
( **Hermenegildo Magno Gomes** )

## INTISARI

Tesis yang berjudul: “KEBIJAKAN PEMERINTAH TIMOR LESTE TERHADAP HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN TERCAPAINYA KEADILAN” dengan rumusan masalah apakah kebijakan pemerintah Timor Leste terhadap hak kepemilikan atas tanah dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi warga negara dan bagaimana kebijakan pemerintah Timor Leste terhadap hak kepemilikan atas tanah untuk tercapainya keadilan bagi warga negara. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah Timor Leste terhadap hak kepemilikan atas tanah dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi warga Negara dan bagaimana kebijakan pemerintah Timor Leste terhadap hak kepemilikan atas tanah untuk tercapainya keadilan bagi warga Negara. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus para peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak kepemilikan atas tanah di Timor Leste pada masa penjajahan bangsa Portugis, pendudukan bangsa Indonesia dan kemerdekaan Timor Leste.

Hasil penelitian bahwa pemerintah Timor Leste telah membuat peraturan perundang-undangan sebanyak 6 dan RUU tentang hak kepemilikan atas tanah di Timor Leste/*PROPOSTA DE LEI NO. /2010 REGIME ESPECIAL PARA A DEFINIÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS IMÓVEIS (Regulasi khusus untuk defenisi hak milik atas tanah)* sebagai hukum tertinggi setelah Konstitusi RDTL yang sudah disahkan oleh Dewan Menteri Timor Leste pada tanggal 10 Maret 2010 yang pada bulan Januari 2012 Parlamento Nacional de Timor Leste (DPRnya Timor Leste) yang sudah dibahas pada tingkat komisi dan bersumber pada Pasal 54 dan 141 Konstitusi RDTL.

Berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan Rancangan Undang-Undang/RUU tersebut sebagai hasil dari kebijakan pemerintah Timor Leste terhadap hak kepemilikan atas tanah sehingga dapat mewujudkan perlindungan hukum. Hal ini dapat dilihat melalui aspek, seperti warga negara asli menjadi subjek hukum, prosedur pengurusan/pendaftaran tanah serta lembaga DNTPSC RDTL dibawah Kementerian Kehakiman RDTL yang bertugas untuk mengatur tanah berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1, tanggal 10 Maret 2003 tentang Regulasi Hukum bagian I: Harta benda tidak bergerak. Namun keadilan terhadap hak kepemilikan atas tanah belum dapat diperoleh warga negara Timor Leste karena peraturan perundang-undangan dan RUU di Timor Leste tersebut belum terdapatnya pasal-pasal yang membahas secara khusus tentang hak kepemilikan atas tanah dalam hal batas maksimum dan minimum hak milik atas tanah (tanah pertanian dan non pertanian).

***Kata-kata kunci: Kebijakan Pemerintah, Timor Leste, Hak Kepemilikan atas Tanah, Perlindungan Hukum dan Keadilan.***

## ABSTRACT

Thesis entitled: "TIMOR LESTE GOVERNMENT OWNERSHIP OF LAND IN THE MAKING LEGAL PROTECTION OF THE ACHIEVEMENT AND JUSTICE" the formulation of the problem whether the government's policy towards Timor-Leste the right to land ownership in the realization of legal protection for citizens and how government policy towards the rights of Timor-Leste ownership of land to the achievement of justice for citizens. The research objective was to determine whether the policy of the government of Timor-Leste to the right of land ownership in the realization of legal protection for citizens and how government policy towards Timor-Leste right of ownership of the land to the achievement of justice for citizens. This type of research is the normative legal research studies that focus the legislation relating to land ownership rights in Timor-Leste during Portuguese and Indonesia occupation and also after Timor-Leste got independence.

The results that the government of Timor-Leste has made the legislation as much as six Draft Law on the rights of land ownership in Timor-Leste/**PROPOSTA LEI DE NO. / 2010 A REGIME ESPECIAL PARA DOS DEFINIÇÃO TITULARIDADE DA BENS IMÓVEIS** (special regulations for the definition of property rights over land) as the supreme law after the Constitution which was approved by cabinet of council in Timor-Leste on March 10, 2010 it was send to National Parliament Timor Leste on January 2012 to discussed at the commission level with rooted in Article 54 and 141 of the Constitution.

Base with the legislation and the draft Law as a result of government policy towards Timor-Leste property rights over land as to realize the protection of the law. It can be seen through to aspects, such as native citizens subject to the laws, procedures, administration/registration of land as well as agencies under the Ministry of Justice DNTPSC Timor-Leste in charge to manage the land under Article 17 of Law number 1 of date 10 of March 2003 on Regulation of the Law Part I: property does not move. But justice against intellectual property rights to land can not be obtained because the citizens of Timor-Leste legislation and the draft Law in Timor-Leste can not discuss with the articles that specifically about ownership land in terms of maximum and minimum limits of property the rights land with (agricultural and non agricultural land).

Key words: government policy, Timor-Leste, Ownership of land rights, Protection of the Law and Justice.